

Bab 1 Pendahuluan Universitas Indonesia

Getting the books **Bab 1 Pendahuluan Universitas Indonesia** now is not type of inspiring means. You could not single-handedly going once ebook growth or library or borrowing from your connections to edit them. This is an unconditionally easy means to specifically get guide by on-line. This online broadcast Bab 1 Pendahuluan Universitas Indonesia can be one of the options to accompany you behind having new time.

It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will no question proclaim you extra matter to read. Just invest tiny era to contact this on-line broadcast **Bab 1 Pendahuluan Universitas Indonesia** as without difficulty as evaluation them wherever you are now.

Bab 1 Pendahuluan Universitas Indonesia

2020-08-30

JAYLEN EVA

Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal PT. RajaGrafindo Persada

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan sosial telah lama dikenal dan digunakan setelah pendekatan dari atas (top-down) yang dinilai tidak mampu mengembangkan masyarakat untuk berkembang mandiri dan memenuhi kualitas hidup yang diharapkan. Pendekatan bottom up selanjutnya juga mendorong berkembangnya partisipasi dan kerja sama multipihak dalam melaksanakan program pembangunan sosial. Bagaimana sebuah program yang dirancang partisipatif dan kerja sama multipihak juga dievaluasi secara partisipatif? Evaluasi program di tingkat komunitas penting dipahami dari aspek sosiologis, karena pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas (community based development) adalah kunci keberhasilan program pembangunan sosial. Model EFPPS (Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial) dikembangkan untuk mengevaluasi sebuah program yang sedang berjalan dan bertujuan untuk memberi masukan bagi implementasi program pada tahap selanjutnya. Buku ini memberi pengetahuan bagi para peneliti maupun berbagai pihak implementator program untuk melakukan evaluasi secara partisipatif dan aplikatif, sehingga tujuan program pembangunan sosial untuk mencapai keberlanjutan dapat tercapai secara maksimal. Kelebihan dari buku ini adalah bagaimana evaluasi dilakukan dengan mengolah berbagai informasi dari berbagai sudut pandang para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam program, baik pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta (korporasi), bahkan oleh warga komunitas yang menjadi sasaran dari program itu sendiri. Masukan yang diperoleh dari berbagai pihak dalam evaluasi partisipatif seperti ini diharapkan dapat lebih meningkatkan dukungan bagi keberlanjutan program, dan pada akhirnya meningkatkan kebermanfaatan program yang dikembangkan

Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia Edisi Pertama Lulu.com

Buku RIRR 5.0 ini disusun berdasarkan pasal 51 ayat 2 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 bahwa perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi. Penyusunan RIRR 5.0 merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemdikbudristek/BRIN) yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Raharja sebagai perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan kegiatan-kegiatan penelitian.

Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia Penerbit Qiara Media

Dalam buku ini diuraikan berbagai pertentangan antara lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) di Indonesia yang didasarkan pada faktor objektif maupun subjektif sebagai indikator yang melekat pada kedua lembaga tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi mata kuliah Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Tata Negara karena menjelaskan metode perbandingan sebagai pendekatan khusus. Artinya penulis menggunakan metode perbandingan dalam menganalisis berbagai tugas dan kewenangan Wakil Presiden di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Filipina, Republik Rakyat China, Irak, India, Bulgaria, dan Siprus. Pembahasan mengenai wakil presiden masih sangat langka, sehingga kehadiran buku ini mampu menstimulus para pembaca melanjutkan "kisi-kisi persoalan mendasar" dalam bidang Hukum dan Politik. Hal ini berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden seperti kewenangan Wakil Presiden apabila Presiden berhalangan sementara dan kewenangan Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden, maupun mekanisme pengisian jabatan Presiden jika Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai mekanisme pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya terbukti melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Publica Indonesia Utama

Buku Ilmu Hukum yang berjudul Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan buku karya Zainuddin & Zulfiani. Buku ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kepastian dan kedudukan harta kekayaan hasil dari perkawinan siri. Buku Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas tentang Pernikahan siri, praktiknya di Indonesia tidak sedikit orang yang melakukan pernikahan siri. Perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia, di mana perkawinan tersebut cukup memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Daftar isi buku ini meliputi : Bab I Pendahuluan Bab II Hukum Perkawinan Di Indonesia Bab III Perkawinan Siri Dan Permasalahan Bab IV Perkawinan Siri, Pencegahan Dan Solusinya Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Ilmu Hukum Penulis : Zainuddin & Zulfiani E-ISBN : 978-623-02-5630-1 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 102 hlm Tahun Terbit : 2022 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com

STEM CELL Kultur Kondisi Hipoksia, Upaya Peningkatan Viabilitas, dan Pemeliharaan Jangka Lama Sel Punca Diam PT. RajaGrafindo Persada

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana. Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana yang dibuat berdasarkan analisis secara yuridis, kriminologis, dan sosiologis dalam menyoroiti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisasi, baik mengenal keterpaduannya secara teori maupun praktiknya. Di samping itu, juga mengulas masalah bagaimana aktivitas dari lembaga dan aparat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian diakhiri dengan uraian mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga secara sistematis dan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademisi, praktisi, peneliti, aparat pemerintahan, dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ini menambah khazanah serta wawasan bidang hukum acara khususnya peradilan pidana.

Economics and finance in Indonesia UGM PRESS

Buku "Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Prodi D-III Teknologi Laboratorium Medis" adalah sumber penting bagi mahasiswa dan penulis yang ingin menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas dalam bidang teknologi laboratorium medis. Buku ini dirancang khusus untuk membantu pembaca memahami dan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku dalam konteks program studi D-III Teknologi Laboratorium Medis. Dalam buku ini, pembaca akan dibimbing melalui langkah-langkah praktis untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang komprehensif dan berkualitas tinggi. Buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, termasuk pemilihan topik, penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis statistik, serta penyusunan dan penyajian hasil penelitian. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan tentang etika penulisan ilmiah, penggunaan referensi dan kutipan yang tepat, serta format penulisan yang sesuai dengan standar akademik. Pembaca akan mempelajari cara menyusun abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan dengan cara yang jelas dan terstruktur. Ditulis oleh penulis berpengalaman dalam bidang teknologi laboratorium medis, buku ini memberikan panduan yang jelas dan komprehensif kepada pembaca untuk mengembangkan keterampilan penulisan ilmiah yang efektif dan menghasilkan karya tulis yang berkontribusi dalam bidang studi mereka. Dengan membaca dan mengikuti panduan ini, pembaca akan merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah mereka, serta menghasilkan tulisan yang lebih terorganisir, informatif, dan berdampak dalam disiplin ilmu teknologi laboratorium medis.

MODEL PEMBELAJARAN RADEC (Teori dan Implementasi di Sekolah) Universitas Indonesia Publishing

Buku ini tidak saja menyajikan teori dan analisis jaringan, namun juga memberikan strategi praktis dalam penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu sosial lainnya. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Direktori Edisi Naskah Nusantara EGC

Otoritas Veteriner adalah menyatunya keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh dokter hewan secara melekat setelah lulus dan disumpah dari Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia maupun di Belanda, sesuai dengan Staatsblad 1912 No. 432 Pasal 34 Ayat 1. Lembaga Otoritas Veteriner pada pemerintah ditetapkan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 dari Staatsblad 1912 No. 432. Sejak zaman Belanda sampai dengan 2009, Otoritas Veteriner telah memiliki payung hukum di Indonesia. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 68 Ayat 4 menyebutkan bahwa Otoritas Veteriner telah diambil alih oleh Menteri Pertanian, tetapi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-VII/2010 pada tanggal 27 Agustus 2010 memutuskan Otoritas Veteriner kembali dimiliki oleh dokter hewan.

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG AKADEMIK Nugra Media

Menjembatani kesenjangan antara buku teori makroekonomi dan data sesungguhnya dari suatu perekonomian menjadi tujuan utama keberadaan buku ini. Buku teori makroekonomi, pengenalan konsep, dan pengukuran data biasanya lebih umum saja, padahal pada sumber data (misalnya, dari Biro Pusat Statistik atau Bank Indonesia), konsep dan pengukurannya jauh lebih kompleks. Terlebih lagi jika harus memahami keterkaitan data dari berbagai sumber data. Untuk itu, buku ini menawarkan penjelasan "Tujuh Neraca Makroekonomi Indonesia" yang mencoba menyeringikan konsep, data, dan keterkaitannya dalam memahami suatu perekonomian secara agregat. Buku ini menjelaskan konsep dasar dan pengukuran empat neraca dasar makroekonomi, yaitu Neraca Produk Domestik Bruto, Neraca Fiskal, Neraca Pembayaran, dan Neraca Moneter. Lebih lanjut juga diperkenalkan tiga neraca turunan yang dalam hal ini adalah Neraca Arus Dana, Neraca Input Output, Neraca Sistem Neraca Sosial Ekonomi, serta Neraca Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Finansial turut serta dibahas dengan singkat. Tujuh Neraca Makroekonomi tersebut diperlukan untuk memahami kondisi perekonomian agregat suatu negara, tetapi biasanya dibahas secara terpisah. Padahal, dalam memahami perekonomian suatu negara Indonesia, pengetahuan mengenai neraca secara keseluruhan menjadi penting. Sebab itu, untuk memahami perekonomian Indonesia, buku ini menghadirkan penjelasan neraca-neraca tersebut beserta contoh datanya di Indonesia. Menurut hemat penulis, memahami konsep dasar dan data dari Neraca-Neraca Makroekonomi tersebut di atas bukan hanya membantu dalam memahami perekonomian Indonesia, tetapi juga diperlukan dalam mempelajari perekonomian negara (ekonomi) lainnya. Karena itu, buku ini juga memberikan daftar alamat situs-situs resmi berbagai sumber data yang bisa didapatkan secara daring atau online baik terkait data Indonesia maupun data-data negara lainnya. Buku ini berguna bagi mahasiswa yang belajar ekonomi atau juga berbagai pihak yang hendak memulai belajar terkait dengan perekonomian Indonesia dan bahkan untuk mempelajari perekonomian negara lainnya secara agregat.

Dilema PKS CV. Ruang Tentor

Politik hukum nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme belum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ia terkesan kurang menghormati nilai-nilai dan eksistensi lembaga-lembaga agama, kurang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, kurang menghormati nilai-nilai demokrasi dan kurang memenuhi rasa keadilan sosial bangsa dan rakyat Indonesia. Kondisi ini dapat berpotensi mengancam integrasi bangsa. Perkembangan konstelasi politik internasional dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme sangat didominasi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi negara-negara Adidaya, baik dalam regulasinya dalam berbagai konvensi internasional, resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, begitu pula penerapan dan penegakan hukumnya. Kondisi ini dirasakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena sering menggunakan standar ganda (double standard), tidak menghormati HAM dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan asas persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Buku ini menguraikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik hukum nasional Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dikaitkan dengan perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer. Kemudian menjelaskan latar lahirnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta menganalisis sejauh mana perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer berimplikasi terhadap pembentukan dan penegakan UU tersebut. Buku ini sesuai bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang mengambil mata kuliah Tindak Pidana Khusus, Politik Hukum, Tindak Pidana Terorisme, dan bagi praktisi hukum. Buku ini juga sesuai bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional serta pejabat baik pusat dan daerah yang bergelut dalam kebijakan pembuatan UU/Perda.

Reports Sinar Grafika

Dunia menghadapi babak baru dalam “perang” menghadapi pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Lewat Perjanjian Paris yang berlangsung pada 2015, dunia sepakat untuk mulai mengurangi penggunaan sumber energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca serta mulai memanfaatkan energi baru dan terbarukan (renewable energy). Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris 2015, Indonesia juga tengah berjuang untuk bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama dari segi pembangkit listrik. Saat ini, Presiden Joko Widodo gencar mempromosikan pembangunan sumber-sumber pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di seluruh pelosok negeri. Di sisi lain, penggunaan sumber energi baru dan terbarukan di seluruh dunia mendorong tumbuhnya industri-industri baru berbasis renewable energy. Industri mobil listrik dan baterai penyimpanan energi (energy storage system) menjadi bidang industri baru yang banyak diminati konsumen. Tesla, raksasa mobil listrik dari Amerika, telah membuat industri ini berkembang secara cepat dan masif. Indonesia punya potensi besar untuk menjadi raksasa baru dalam industri energi baru dan terbarukan. Sebab, Indonesia memiliki kandungan nikel—yang menjadi bahan baku utama dalam pengembangan industri mobil listrik dan baterai penyimpanan energi—terbesar di dunia. Rentetan perkembangan energi baru dan terbarukan di dunia, termasuk Indonesia, disulam dengan baik oleh Cyrilus Harinowo, Ph.D. dan Ika Maya Sari Khaidir, S.E., M.M. lewat Menuju Zaman Renewable Energy. Buku ini berusaha menjelaskan secara rinci keterkaitan antara tren penggunaan energi baru dan terbarukan di dunia, perkembangan industri mobil listrik dan energy storage system, dan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Pada akhirnya, Menuju Zaman Renewable Energy adalah jawaban lengkap atas pertanyaan tentang kesiapan Indonesia menyongsong era baru pemanfaatan energi dan sumber daya alam.

Respirologi PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers

AQIDAH DAN SYARIAH ISLAM (Sebuah Bunga Rampai) PENULIS: M. Adiguna Bimasakti Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-7328-47-6 Terbit : November 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam Islam, agama (diin) bukan hanya soal kepercayaan individual semata, melainkan keseluruhan konsep yang utuh dari segala aspek hidup manusia. Dalam Al-Quran terkadang agama juga disebut sebagai millah, kata yang diambil dari Bahasa Arab (Nenek Moyang Bahasa Suryani) yang berarti “tenda” (Millata Ibrahiima – Millah Ibrahim / Tenda Ibrahim / Agama Ibrahim) dan kemudian diserap kedalam Bahasa Ibrani berubah makna menjadi “kalimat” atau “kata-kata”, kemudian dalam Terminologi Bahasa Arab menjadi setara dengan kata “diin” yang berarti juga “agama”. Artinya agama mestilah menaungi manusia dan melindunginya, serta sesuai dengan hadits: “Agama adalah Nasihat” (Shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, hadits no. 55 dan no. 95). Berangkat dari sana, maka keseluruhan aspek hidup manusia harus dapat dijawab oleh agama, dari mulai permasalahan Aqidah (keyakinan), akhlak (perilaku), dan syariah (tuntunan hukum). Seiring berkembangnya waktu, bertambah kompleks pula permasalahan yang ditemui umat Islam dalam menjalankan agamanya di tengah masyarakat modern. Untuk itulah tulisan-tulisan dalam buku ini mencoba untuk mengulas permasalahan-permasalahan tersebut, utamanya yang terkait dengan Aqidah dan syariah dalam Islam. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Analisis Jaringan Komunikasi Kencana

Teori hukum terbentuk dan terpengaruh oleh dinamika kehidupan hukum sebagaimana berikut. Pertama, teori hukum muncul karena adanya pertumbuhan pemikiran tentang keilmuan hukum dan keilmuan ransdisipliner hukum. Kedua, teori hukum muncul karena adanya isu, masalah dan konflik hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari pembentukan hukum terutama di negara-negara maju. Ketiga, teori hukum muncul karena adanya konvergensi dan diskonvergensi sistem hukum di berbagai belahan dunia yang berbasis kepada berbagai peradaban kebijakan hukum. Keempat, teori hukum muncul karena adanya perkembangan modernisasi hukum sebagai dampak dari pembangunan hukum di berbagai negara. Kelima, teori hukum muncul akibat adanya akumulasi kasus ataupun perkara yang menimbulkan desakan untuk adanya terobosan hukum ataupun penemuan hukum. Buku ini merupakan tulisan yang dilatarbelakangi oleh basis pengajaran dan pendidikan teori hukum terutama untuk para peserta didik yang berada dalam masa pembelajaran di Fakultas Hukum. Teori hukum menjadi signifikan karena adanya pertumbuhan dan perkembangan keilmuan hukum dan keilmuan transdisipliner hukum sehingga dapat dikatakan bahwa teori hukum bertumbuh dan berkembang dari satu pendekatan keilmuan hukum ke pendekatan keilmuan transdisipliner hukum atau sebaliknya. Dalam tulisan ini diuraikan tentang eksistensi baik dalam teks pemahaman hukum, pengertian hukum, pengetahuan hukum dan penguasaan hukum terutama tentang kemanfaatan hukum, kebaikan hukum, kepastian hukum, kebijakan hukum, keadilan hukum dan kebenaran hukum.

Pemberantasan Terorisme Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia PT.

RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers

Aktualisasi Pancasila merupakan menjadikan betul betul ada lima aturan perilaku yang baik yang berupa nilai-nilai terkandung pada setiap sila sila Pancasila yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUDNRI 1945 tersebut ke dalam undang-undang di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi ada dalam sebuah undang-undang terutama sekali dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang yakni pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, danpengundangan. Hal ini didasari bahwa Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni UUDNRI 1945 yang di dalamnya juga terdapat Pancasila sebagai sumber hukum sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUDNRI 1945. Undang-Undang inilah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman akan aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam tahapan pembentukan undang-undang, sebagai hasil penelitian disertasi penulis. Selain itu, pemahaman akan aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam tahapan pembentukan undang-undang pertama, menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk menjadikan nyata nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum. Kedua, menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengontrol pembentuk undang-undang. ketiga, menjadi pedoman bagi lembaga terkait dalam melakukan evaluasi kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang yang telah diundangkan.

Dagang Pengaruh (Trading In Influence) di Indonesia Sinar Grafika

Model pembelajaran RADEC sebagai model pembelajaran alternatif telahdikembangkan untuk membantu para pendidik dalam upaya menyelenggarakanpembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Model ini dalam pengembangan dan pengujiannya dilakukan dan disesuaikan dengan situasi dankondisi di Indonesia. Ini bertujuan agar para pendidik tidak menghadapi banyakkendala sebagaimana yang biasa mereka hadapi ketika akanmengimplementasikan model lain yang diciptakan ahli dari luar negeri. Secara keseluruhan buku ini terdiri atas sembilan bab yang mencakup uraianmengenai model pembelajaran RADEC baik secara teoritik maupun empirik,termasuk keunggulan dan keterbatasannya, serta pendukung danpenghambatnya. Beragam perangkat pembelajaran yang disajikan dapat diadopsidan diadaptasi oleh pendidik mulai dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK. Buku ini juga dilengkapi dengan urgensi pengembangan keprofesian berkelanjutan,pembahasan pertanyaan seputar model pembelajaran RADEC, serta temuan-temuan selama implementasi model ini. Dengan demikian buku ini juga dapatmemberikan pemahaman yang utuh terkait model pembelajaran RADEC.

PERJALANAN PANJANG TNI DALAM MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DARI ANCAMAN TERORISME (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara) Sinar Grafika

Sistem ekonomi di dunia kerap dilihat hanya menjadi dikotomi antara kapitalis dan sosialis Sebagian besar negara memilih salah satu di antaranya atau mengambil jalan tengah yang mencampurkan kedua sistem tersebut Banyak negara malah hanya mengikuti arus dominasi negara adidaya yang memiliki hegemoni ekonomi politik dalam percaturan dunia internasional Sejarah Indonesia menunjukkan fakta bahwa negara ini kerap terombang-ambing oleh kebingungan ideologi ekonomi Sebagian menyatakan ekonomi sebaiknya diserahkan pada pasar, sebagian lain menyatakan harus dikontrol negara Kebanyakan lupa, founding fathers kita telah menyelesaikan pembahasan ini jauh hari ketika Indonesia merdeka Buku ini ditujukan guna mengembalikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan Bahwa Indonesia memiliki Sistem Ekonomi Kerakyatan yang sudah tercantum dalam UUD 1945 dan karenanya wajib diterapkan dalam seluruh produk hukum ekonomi nasional Tidak boleh ada lagi undang-undang minyak bumi dan gas, undang-undang sumber daya air, undang-undang ketenagalistrikan, dan undang-undang menyangkut ekonomi yang dibatalkan karena melanggar Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan UUD 1945 Seluruh komponen rakyat wajib menjadi penjaga demokrasi ekonomi Indonesia.

TEORI HUKUM: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi Penerbit Adab

Sejatinya peran negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan (welfare state) dan perlindungan (protection) termasuk kepada konsumen Muslim, maka sesungguhnya tujuan tersebut merupakan state interests/al-maṣlaḥah al-dauiyyah. Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah control of misleading information. Peran tersebut merupakan wajib kafa’i (collective responsibility) terhadap massive and credential products dengan mandatory halal certification and labeling, karena kehalalannya tidak dapat divalidasi oleh konsumen Muslim. Jika tidak, akan mengancam terjadinya market failure yang disebabkan oleh information asymmetries, gagasan tersebut lahir dari public interests/al-maṣlaḥah. Dengan demikian dapat diformulasikan, analisis state interests/al-maṣlaḥah al-dauiyyah terhadap public interests/al-maṣlaḥah. ----- Sebuah buku tentang hukum perlindungan konsumen persembahan penerbit Kencana (PrenadamediaGroup) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* SPASI MEDIA

Dalam praktik sehari-hari seorang ahli obstetri dan ginekologi (OBGIN) atau bahkan seorang sub spesialis onkologi ginekologi tidak terlalu sering menghadapi kasus penyakit trofoblastik gestasional mulai dari spektrum yang paling sering dan dianggap sederhana seperti abortus mola atau kehamilan mola, sampai yang cukup kompleks seperti mola persisten atau mola invasif misalnya. Namun bila dihadapkan dengan kasus seperti ini mau tidak mau seorang ahli OBGIN seyogyanya minimal dapat melakukan diagnosis kerja dan melakukan manajemen awal. Terlebih apabila berhadapan dengan kelompok spektrum non-mola yang dianggap sebagai suatu neoplasma trofoblastik gestasional.

Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial (EFPPS) Merdeka Kreasi Group Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk memfasilitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.

Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kepustakaan Populer Gramedia

Judul : HUKUM ISLAM : SEBUAH ANALISA BIDANG PERKAWINAN DAN WARISAN DI SUMATERA UTARA Penulis : Dr. Saipul Muluk Siregar, MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 208 Halaman No ISBN : 978-623-497-146-0 SINOPSIS BUKU Buku ini berjudul “Hukum Islam : Sebuah Analisa Bidang Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara”. Buku ini penulis kontribusikan untuk bidang hukum di Indonesia dan khususnya di bidang hukum islam dalam bidang perkawinan dan warisan di Sumatera Utara. Buku ini terdiri dari enam bab. Adapun pembahasan masing-masing ba dalam buku ini adalah sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Proses Hukum Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara Bab 3 Alasan Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara Bab 4 Keselarasan Hukum Perkawinan dan Warisan di Sumatera Utara Bab 5 Eksistensi Hukum Islam di Sumatera Utara Bab 6 Penutup Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi pembaca yang ingin memahami tentang hukum islam dalam bidang perkawinan dan warisan di Sumatera Utara